



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

Jl. Pemuda No. 29A Bogor 16161
Telepon (0251) 8377111, 8353712 Faksimili (0251) 8353712

Nomor : B-26003 /KP.430/F5.A/03/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Bukti pelaporan e-LHKPN tahun 2019

26 Maret 2019

Yth. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Di Jakarta.

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 8109/Kpts.430/F/08/2018, tanggal 10 Agustus 2018 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2018, Penyelenggara Negara sebagaimana nama-nama tersebut dibawah ini wajib laport harta kekayaan:

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Drh. Hasan Abdullah Sanyata	197001102002121001	KPA
2.	Muhammad Iwan Dzulfesar	197708081997031001	PPK
3.	Drh. Rr. Anik Winanningrum	197512212008012012	PPSPM
4.	Kudung Suroso	198507182009101001	Bendahara Pengeluaran
5.	Angryani Chahyaningtyas P.	197909022008122001	Bendahara Penerimaan
6.	Ading Wahyudi, A.Md	197903312006041018	Pejabat Pengadaan
7.	Metrizal, S.Pt	198403192008011003	Pejabat Pengadaan

Sehubungan hal tersebut diatas bersama ini kami laporkan bahwa penyelenggara Negara dimaksud telah melaporkan harta kekayaan secara online sesuai aplikasi e-LHKPN yang disyaratkan oleh KPK. Berikut kami lampirkan bukti-bukti pelaporan:

1. Bukti lembar penyerahan formulir LHKPN.
2. Bukti surat kuasa e-LHKPN bermeterai yang sudah ditandatangani.
3. Bukti Pengiriman Via Pos pelaporan e-LHKPN secara online ke KPK.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Balai,

Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001



LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : MUHAMMAD IWAN DZULFEZAR
Tempat/Tanggal Lahir : JAYAPURA / 8 Agustus 1977
Nomor KTP/NIK : 3175100808770007
Alamat : BAMBU KUNING NO. 23, BAMBU APUS, CIPAYUNG, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

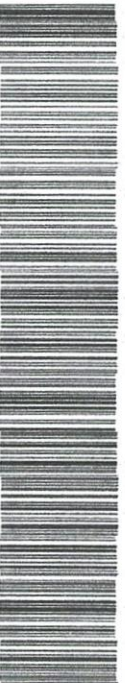
K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak diandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



26-March-2019
Pemberi Kuasa,



(Signature)

*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**) Corot yang tidak perlu Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(MUHAMMAD IWAN DZULFEZAR)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : HASAN ABDULLAH SANYATA
Tempat/Tanggal Lahir : KLATEN / 10 Januari 1970
Nomor KTP/NIK : 3404071001700008
Alamat : GOWOK RT 014, RW 006 NO. 322 CATURTINGGAL DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA 55281,
CATURTINGGAL, DEPOK, SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak diandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.

25-March-2019
Pemberi Kuasa,



*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(HASAN ABDULLAH SANYATA)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : ANIK WINANNINGRUM

Tempat/Tanggal Lahir : LAMONGAN / 21 Desember 1975

Nomor KTP/NIK : 3271026112750005

Alamat : PARUNG BANTENG AL BUSRO NO. 8, KELURAHAN KATULAMPA, BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR, JAWA BARAT

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
- a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
- a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhingga sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



25-March-2019
Pemberi Kuasa



(ANIK WINANNINGRUM)

*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : ANGRYANI CHAHYANINGTYAS PERWITASARI

Tempat/Tanggal Lahir : MALANG / 2 September 1979

Nomor KTP/NIK : 3271054209790011

Alamat : JALAN KEDONDONG BLOK C2/20 Bogor, TEGALGUNDIL, KOTA BOGOR UTARA, BOGOR, JAWA BARAT

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

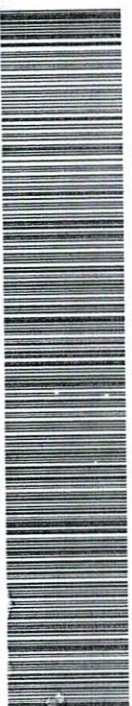
Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
- a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
- a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak diandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.

24-March-2019
Pemberi Kuasa,



*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(ANGRYANI
CHAHYANINGTYAS
PERWITASARI)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : ASEP EKA NUR HIDAYAT
Tempat/Tanggal Lahir : SUMEDANG / 2 Maret 1978
Nomor KTP/NIK : 3271050203780020
Alamat : JALAN KEDONDONG BLOK C2/20 Bogor, Kelurahan TEGAL GUNDIL, Kecamatan KOTA BOGOR UTARA,
Kabupaten/Kota BOGOR, Provinsi JAWA BARAT

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/pihak/profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:

- a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- b. Lembaga/pihak/profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak diandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



24-March-2019
Pemberi Kuasa,



*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(ASEP EKA NUR HIDAYAT)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : KUDUNG SUROSO

Tempat/Tanggal Lahir : BATANG / 18 Juli 1985

Nomor KTP/NIK : 3671081807850003

Alamat : Kp Nagrak R/Rw 05/06, PERIUK, PERIUK, KOTA TANGERANG, BANTEN

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan. 12950, Indonesia. yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
- a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- b. Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;
- c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
- a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- b. Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;
- c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



25-March-2019
Pemberi Kuasa,


KUDUNG SUROSO
60000
ENYABUR RUMPAH

(KUDUNG SUROSO)

*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : METRIZAL
Tempat/Tanggal Lahir : KUBANG PIPIK / 19 Maret 1984
Nomor KTP/NIK : 3271041903840004
Alamat : Bogor Raya Pemail Blok FL 3 No. 20, CURUG, BOGOR BARAT, BOGOR, JAWA BARAT

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

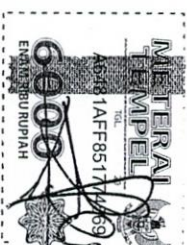
1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



25-March-2019
Pemberi Kuasa,



*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah
(METRIZAL)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : ADING WAHYUDI
Tempat/Tanggal Lahir : KUNINGAN / 31 Maret 1979
Nomor KTP/NIK : 3271063103790003
Alamat : Jl. Kebon Pedes RT. 02 RW. 10 No. 18 Tanah Sareal Kota Bogor, KEBON PEDES, TANAH SAREAL, BOGOR,
JAWA BARAT

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



19-March-2019
Pemberi Kuasa,



*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(ADING WAHYUDI)



**KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI
REPUBLIC INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4,
Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA**

Atas Nama : HASAN ABDULLAH SANYATA
Jabatan : KEPALA BALAI
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
**Tanggal /
Tahun** : 25 Maret 2019
Pelaporan

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA**

Atas Nama	: MUHAMMAD IWAN DZULFEZAR
Jabatan	: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: KEMENTERIAN PERTANIAN
Tanggal / Tahun	: 2018
Pelaporan	

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari





**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA**

Atas Nama : ANIK WINANNINGRUM

Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN
: SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Bidang : EKSEKUTIF

Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN

**Tanggal /
Tahun** : 2018

Pelaporan

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA**

Atas Nama : KUDUNG SUROSO
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
**Tanggal /
Tahun** : 2018
Pelaporan

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh



REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4,
Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA**

Atas Nama : ANGRYANI CHAHYANINGTYAS
PERWITASARI

Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN

Bidang : EKSEKUTIF

Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN

**Tanggal /
Tahun** : 14 Maret 2019

Pelaporan

**KOMISI PEMERIKSAAN
KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

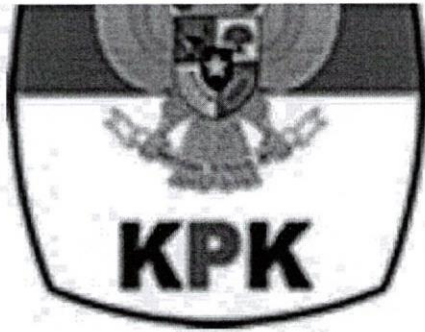


Jl. Kuningan Persada Kav. 4,
Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : METRIZAL
Jabatan : PEJABAT PENGADAAN
: BARANG DAN JASA
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Tanggal / Tahun : 13 Februari 2019
Pelaporan

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN.



REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4,
Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA**

Atas Nama	: ADING WAHYUDI
Jabatan	: PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: KEMENTERIAN PERTANIAN
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2018

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan



Nomor Connote: 082300004485919



YES	TUNAI	Rp18,000.-
Pengirim: BPMSPH BOGOR, BOGOR Telp. +6281329322015		CGK-SLT 12950
Penerima: PIMPINAN KPK JL. KUNINGAN PERSADA KAV 4, SETIABUDI JAKARTA S, 12950 Telp. +628		
	Deskripsi: DOKUMEN	Tanggal : 26-03-2019 16.44 No. Pelanggan : 10987700 Kota Asal : Bogor Berat : 1 Kg Jumlah Kiriman : 1 Jenis Kiriman : Doc Pembayaran : Tunai
	Intruksi Khusus: DOKUMEN LHKPN A/N DRH. HASAN AS & ANGRYANI	